

AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM
HAL EKSEKUSI OBJEK JAMINAN

(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kantor Wilayah Jawa Timur)

SKRIPSI

(Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur)



Disusun Oleh :

Yudhian Amada
NPM. 0671010049

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011

**AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM
HAL EKSEKUSI OBJEK JAMINAN**

(Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Kantor Wilayah Jawa Timur)

SKRIPSI

(Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur)



Disusun Oleh :

Yudhian Amada
NPM. 0671010049

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2011**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “Akibat hukum akta fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal eksekusi obyek jaminan (Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur) ”.

Penulisan skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan sesuai kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu dapat memberikan hal-hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu dalam mengadakan penelitian guna penyusunan skripsi.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan, bimbingan, dan dorongan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur , serta selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum selaku Wadek I Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Bapak Drs. EC Gendut Soekarno, MS selaku Wadek II Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

4. Bapak Panggung Handoko.,S.sos.,S.H., MM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Bu Yana Indawati, S.H., M.Kn selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan l skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik;
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Bapak Sariyanto S.Sos selaku Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Mustiko, S.H.,MM selaku Kasub. Bidang Pelayanan Hukum dan Bapak Aslam, S.H sebagai Staff Pelaksana Sub. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha Di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur. Terima kasih atas bantuannya.
9. Bapakku Dariono dan Ibuku Amenah atas dukungan moril dan materiil serta doa penuh kasih sayang yang memberi dorongan terbesar untuk terselesaikan skripsi ini.
10. Aseptya Nur Achmad, Sigit Priyambodo, Aditama Joko Dickmantyo, Angga, Wisma, Gufron, Farit Kurniawan dan juga angkatan 2007, Andriansyah, kekasih saya Vera yang memberi support and spirit serta segenap dosen, staff juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang tidak kami sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 18 November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN REVISI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Kajian Pustaka.....	5
A. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia.....	5
B. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia.....	11
C. Asas-asas Jaminan Fidusia	17
D. Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia.....	21
E. Akta Jaminan Fidusia.....	26

F. Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.....	28
1.6 Metode Penelitian	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Sumber Data.....	40
C. Metode Pengumpulan Data	41
D. Analisis Data	42
1.7 Sistematika Penulisan.....	42
1.8 Waktu Penelitian	44
 BAB II AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN	
DALAM HAL EKSEKUSI OBJEK JAMINAN	45
2.1 Tentang Akibat Hukum Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.....	45
2.2 Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan.....	46
 BAB III KEKUATAN HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TELAH DIDAFTARKAN	
TERHADAP EKSEKUSI OBJEK JAMINAN	54
3.1 Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia.....	54
3.2 Akibat Hukum Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia	61
3.3 Proses Eksekusi Objek Jaminan Yang Aktanya Telah	
Didaftarkan.....	63
3.4 Analisa Kekuatan Hukum Akta Fidusia Yang Telah	
Didaftarkan Terhadap Eksekusi Objek Jaminan.....	66

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Yudhian Amada
NIM : 0671010049
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 29 Juni 1987
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**AKIBAT HUKUM AKTA FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN DALAM
HAL EKSEKUSI OBJEK JAMINAN**
(Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor
Wilayah Jawa Timur)

ABSTRAKSI

Saat ini banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit atau pinjaman).

Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan gejala yang menjadi bahan atau objek dari penelitian tersebut. Kemudian dilakukan penjelasan-penjelasan yang kritis, yakni dalam bentuk kerangka sistematis yang berdasarkan aspek yuridis.

Setelah melakukan analisa ini dapat disimpulkan bahwa akta fidusia yang tidak didaftarkan apabila debitur wanprestasi maka kreditur tidak bisa langsung melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia namun harus menempuh gugatan secara perdata di pengadilan berdasarkan ketentuan KUHPperdata. Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Dan tidak ada kejelasan mengenai cara eksekusi fidusia, sehingga karena tidak ada ketentuan yang mengaturnya, banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia dengan memakai prosedur gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan.

Dalam fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 yang berbunyi: “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Eksekusi tidaklah selalu identik dengan pelaksanaan putusan hakim yang tetap, mengingat syarat utama dalam suatu eksekusi harus memiliki “titel”.

Kata Kunci : Akta Fidusia Yang Tidak Didaftarkan, Eksekusi Objek Jaminan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Eksistensi Fidusia sebagai pranata jaminan diakui berdasarkan yurisprudensi. Konsistensi fidusia berdasarkan yurisprudensi yang pernah ada adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas kebendaan atau barang-barang bergerak (untuk debitur) kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada kreditur dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau tanpa cidera janji maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas barang-barang tersebut kepada debitur (contribution processorium).

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat non-possessory. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat possessory, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan debitur bersifat sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminan tersebut.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disingkat dengan UU Jaminan Fidusia), keberadaan praktek fidusia di Indonesia dilandaskan kepada yurisprudensi dari Hoge Raad Belanda yang dikenal putusan Bier Broumerji Arrest, dimana hakim untuk pertama kali mengesahkan adanya mekanisme penjaminan seperti tersebut. Sebelum UU Jaminan Fidusia sedikit sekali panduan yang dapat dipegang sebagai referensi bagi keberlakuan instrumen fidusia. Ada juga beberapa ketentuan perundang-undangan yang menyinggung fidusia sebagai suatu instrument jaminan. Meskipun begitu, secara umum tidak ada panduan teknis mengenai pelaksanaan instrumen fidusia tersebut. Lahirnya jaminan fidusia merupakan murni didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata) mengenai kebebasan berkontrak.

Tidak ada satu standar buku mengenai syarat formal penjaminan fidusia. Juga tidak ada feature lain yang umumnya terdapat suatu instrument jaminan. Tidak ada hak prioritas yang dimiliki oleh kreditur penerima fidusia. Lebih fatal lagi, tidak ada institusi pendaftaran yang bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan terhadap setiap pembebanan fidusia, sehingga pada masa itu fidusia benar-benar merupakan instrumen yang kurang dapat diandalkan dimata para kreditur.

Kemudian karena krisismoneviter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi beberapa tahun yang silam telah memberikan pelajaran yang amat berharga bagi pelaku usaha Indonesia akan pentingnya

peran instrumen jaminan yang mampu mengamankan nilai piutang dengan memberikan hak preferensi atas piutang tersebut. Gagalnya eksekusi terhadap banyak aset debitur dan kenyataan bahwa banyak sekali aset kosong yang diberikan lewat instrumen personal guarantee maupun corporate guarantee menunjukkan bahwa pelaku ekonomi lebih membutuhkan suatu bentuk jaminan yang secara fleksibel maupun memberikan akses penandaan bagi para debitur tanpa melepaskan aspek kepastian hukum. Maka kemudian terbentuklah UU Jaminan Fidusia.

Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia di Departement Hukum dan HAM, Jalan Kayoon No.50-52 Surabaya. Dan nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirah-irah “ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian memiliki kekuatan eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (parate eksekusi), sesuai UU Jaminan Fidusia.

Saat ini banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Prakteknya lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri kemudian diatas namakan konsumen

sebagai debitur (penerima kredit atau pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur atau pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur atau penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung (parate eksekusi), seperti terjadi dalam pinjaman dalam perbankan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis menarik rumusan masalah tentang :

1. Apa akibat hukum akta fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal eksekusi objek jaminan?
2. Bagaimana kekuatan hukum akta fidusia yang telah didaftarkan terhadap eksekusi objek jaminan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum akta fidusia yang tidak didaftarkan dalam hal eksekusi jaminan.

2. Untuk mengetahui kekuatan hukum akta fidusia yang telah didaftarkan terhadap eksekusi objek jaminan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemahaman baik berupa perbendaharaan konsep-konsep pemikiran atau teori dalam ilmu hukum yang menyangkut aspek-aspek hukum jaminan fidusia, dan dapat juga dipertimbangkan bahan masukan dan sumber informasi dalam penyempurnaan peraturan jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku usaha yang hendak menggunakan jaminan fidusia sebagai salah satu lembaga jaminan.

1.5. Kajian Pustaka

a. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut Pasal 1 angka (2) UU Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Selanjutnya disingkat dengan UU Hak Tanggungan) yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai

agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Apabila debitur cidera janji maka kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda objek perjanjian fidusia.

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal tiga macam eksekusi ialah sebagai berikut :

1. Eksekusi yang tercantum dalam Pasal 196 HIR ialah seseorang dihukum untuk membayar sejumlah uang.
2. Eksekusi yang tercantum dalam Pasal 225 HIR ialah seseorang dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan.
3. Eksekusi riil tidak terdapat dalam HIR akan tetapi dalam praktek banyak dilakukan.
4. Parate eksekusi yaitu eksekusi langsung dalam hal kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial, misalnya dalam soal pajak.¹

Dalam UU Jaminan Fidusia, eksekusi terhadap benda objek perjanjian fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial.
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

¹ Soeparmono, R, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal 195

c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.²

Fidusia menurut asal katanya berasal dari “fides “ yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan hubungan yang berdasarkan kepercayaan.³

Dalam peraturan perundang-undangan tentang lembaga jaminan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia. Pada dasarnya, jenis jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Jaminan materiil (kebendaan), dan
2. Jaminan inmateriil (perorangan).

Jaminan materiil (kebendaan) adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri dan mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Jaminan inmateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap harta kekayaan debitur pada umumnya. Jaminan kebendaan dapat dilakukan pembebanan dengan :

² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani Op.cit hal 152

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Ibid, hal 119

1. Gadai (pand), yang diatur di dalam Bab 20 Buku II KUH Perdata;
2. Hipotek, yang diatur dalam Bab 21 Buku II KUH Perdata;
3. Creditverband, yang diatur dalam Stb.1908 Nomor 542 sebagaimana telah diubah dengan Stb.1937 Nomor 190;
4. Hak Tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 1996;
5. Jaminan Fidusia, sebagaimana yang diatur di dalam UU Nomor 42 Tahun 1999.

Sedang yang termasuk jaminan perorangan adalah :

1. Penanggung (borg) adalah orang lain yang dapat ditagih;
2. Tanggung-menanggung, yang serupa dengan tanggung renteng;
3. Perjanjian garansi.

Dari kedelapan jenis jaminan tersebut diatas yang masih berlaku adalah :

1. Gadai
2. Hak Tanggungan
3. Jaminan Fidusia
4. Borg
5. Tanggung-menanggung
6. Perjanjian garansi

Sedangkan hipotek dan creditverband sudah tidak berlaku lagi, karena telah dicabut dengan UU Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan ataupun lembaga

keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik dan lazim digunakan adalah :

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
2. Tidak melemahkan potensi (kekuasaan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
3. Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat dengan mudah untuk diuangkan guna melunasi hutangnya si penerima (pengambil) kredit.

Pranata jaminan fidusia sudah dikenal dan diberlakukan dalam masyarakat hukum Romawi. Ada 2 bentuk jaminan fidusia, yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico. Keduanya timbul dari perjanjian yang disebut pactum fiduciae yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cessio. Dalam bentuk yang pertama atau lengkapnya fiducia cum creditore contracta yang berarti janji kepercayaan yang dibuat kreditur, dikatakan bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur sebagai jaminan atas utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur apabila utangnya sudah dibayar lunas.⁴

⁴ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Ibid, hal 120

Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Undang-undang yang khusus mengatur tentang hal ini, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 juga menggunakan istilah “fidusia”. Dengan demikian, istilah “fidusia” sudah merupakan istilah resmi dalam dunia hukum kita. Akan tetapi kadang-kadang dalam bahasa Indonesia untuk fidusia ini disebut juga dengan istilah “Penyerahan Hak Milik secara Kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda sering disebut dengan istilah lengkapnya berupa *Fiduciaire Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut dengan istilah *Fiducary Transfer Of Ownership*. Namun begitu, kadang-kadang dalam literatur Belanda kita jumpai pula pengungkapan jaminan fidusia ini dengan istilah-istilah sebagai berikut :⁵

- a. *Zakeheids-Eigendom* (Hak Milik sebagai Jaminan)
- b. *Bezitloos Zakeheidsrecht* (Jaminan Tanpa Menguasai)
- c. *Verruimd Pand Begrip* (Gadai yang Diperluas)
- d. *Eigendom Overdracht tot Zakeheid* (Penyerahan Hak Milik Atas Jaminan)
- e. *Bezitloos Pand* (Gadai Tanpa Penguasaan)
- f. *Bezitloos Pand Recht* (Gadai yang Berselubung)
- g. *Uitbaouw dari Pand* (Gadai yang Diperluas)

⁵ Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal 151

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan :

“ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 menyebutkan :

“ Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari definisi yang diberikan di atas jelas bagi kita bahwa fidusia dibedakan dari Jaminan Fidusia, dimana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Ini berarti pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam fiducia cum creditur contracta diatas.⁶

b. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia

1. Hakikat Jaminan Fidusia

Dari definisi Fidusia yang diberikan UU Jaminan Fidusia dapat kita katakan bahwa dalam Jaminan Fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.

⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Ibid, hal 120

Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *constitutum possessorium*. Ini berarti pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut dimaksud untuk kepentingan Penerima Fidusia. Bentuk pengalihan seperti ini sebenarnya sudah dikenal luas sejak abad pertengahan di Prancis.⁷

Dalam jaminan fidusia pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan bagi pelunasan utang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Ini merupakan inti dari pengertian Jaminan Fidusia yang dimaksud Pasal 1 angka 1. Bahkan sesuai dengan pasal 33 Undang-undang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia apabila debitur cidera janji, akan batal demi hukum.

2. Ruang Lingkup dan Objek Jaminan Fidusia

Pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:⁸

- a. Hak Tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian

⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Ibid, hal 114

⁸ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Ibid, hal 145

bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan UU Hak Tanggungan dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia.

- b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) atau lebih;
- c. Hipotek atas pesawat terbang; dan
- d. Gadai

Pada zaman Romawi, objek Fidusia adalah meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Hal ini dapat dimaklumi karena pada waktu itu tidak dikenal hak-hak jaminan yang lainnya.

Pemisahan mulai diadakan ketika kemudian orang-orang romawi mengenal gadai dan hipotek. Ketentuan ini juga diikuti oleh Negara Belanda dalam Burgerlijke Wetboek-nya. Pada saat ini fidusia muncul kembali di Belanda, maka pemisahan antara barang bergerak yang berlaku untuk gadai dan barang tidak bergerak untuk hipotek diberlakukan juga. objek fidusia dipersamakan dengan gadai yaitu barang bergerak karena pada waktu itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat dalam gadai. Hal ini terus menjadi yurisprudensi baik di Belanda dan di Indonesia.⁹

Perkembangan selanjutnya adalah dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria yang tidak membedakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak melainkan pembedaan atas tanah dan bukan tanah.

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Ibid, hal 139

Bangunan-bangunan yang terletak di atas tanah tidak dapat dijaminan terlepas dari tanahnya. Jadi orang yang memiliki bangunan di atas tanah dengan hal sewa misalnya tidak dapat membebaninya dengan hak tanggungan tersebut. Oleh karenanya jalan satu-satunya adalah dengan fidusia.

Hal yang terakhir ini pernah dipraktekkan oleh Bank Rakyat Indonesia. Di sini ada dua hak yang diserahkan kepada kreditur, yang pertama hak milik atas bangunan dan yang kedua adalah hak sewanya. Khusus mengenai penyerahan hak sewa ini diperlukan persetujuan dari pemilik tanah itu untuk sewaktu-waktu mengalihkan hak sewa atas tanah itu kepada pihak lain. Perkembangan ini adalah sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat Indonesia, dimana banyak orang yang menguasai tanah dengan hak-hak atas tanah yang tidak bisa dijaminan dengan Hak Tanggungan, seperti hak sewa, hak pakai, dan sebagainya. Bangunan-bangunan yang terletak diatas tanah tersebut tidak dapat dijaminan dengan Hak Tanggungan dan ini dapat diatasi dengan Jaminan Fidusia.

Dengan lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu dengan mengacu pada pasal 1 angka 2 dan 4 serta pasal 3 UU Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apa pun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berubah benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Tanggungan

atau Hipotek sebagaimana dimaksud dalam pasal 314 KUHD.¹⁰ Pengertian Debitur adalah pihak yang berhutang kepada pihak lain yang dijanjikan untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. Pihak lain yang “menghutangi” ini biasa disebut sebagai Kreditur. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang atau yang memberikan kredit atau memberikan hutang kepada pihak lain.

Benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut adalah :

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum.
2. Dapat atas benda wujud.
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang.
4. Benda bergerak.
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan.
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hipotik.
7. Baik atas benda yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia tersendiri.
8. Dapat atas suatu satuan atau jenis benda.
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda.
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia.
11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

¹⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Ibid, hal 141

12. Benda persediaan (inventory, stock perdagangan) dapat juga menjadi objek jaminan fidusia.¹¹

Ada kecualian dari prinsip beralihnya fidusia jika benda objek Jaminan Fidusia dialihkan, yaitu jika benda tersebut merupakan barang persediaan. Dalam hal ini, sesuai dengan sifat benda tersebut memang selalu beralih-alih, maka beralihnya benda persediaan tersebut tidak menyebabkan beralihnya fidusia yang bersangkutan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-undang Fidusia No. 42 Tahun 1992.

3. Prosedur Pendaftaran Fidusia di DEPKUMHAM

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia :

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur secara tertulis dalam bahasa Indonesia, yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya;
2. Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang ditandatangani oleh Penerima Fidusia, kusa atau wakilnya;
3. Asli Salinan Akta Jaminan Fidusia tentang Pembebanan Jaminan Fidusia, dibuat dalam bahasa Indonesia;
4. Surat Kuasa, apabila dikuasakan, bermeterai cukup;
5. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia;

Untuk pendaftaran benda bergerak atau benda tidak bergerak tidak dapat di bedakan melainkan sama.

¹¹ Munir fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,hal 23

c. Asas-asas Jaminan Fidusia

Salah satu unsur yuridis dalam sistem hukum jaminan adalah asas hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas hukum dalam suatu undang-undang. Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai asas-asas jaminan fidusia, perlu dijelaskan pengertian asas. Istilah asas merupakan terjemahan dari bahasa latin “principium”, bahasa Inggris “principle” dan bahasa Belanda “beginsel”, yang artinya dasar yaitu sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.

Kata “principle” atau asas adalah sesuatu, yang dapat dijadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan, sebagai tempat untuk menyadarkan, untuk mengembalikan sesuatu hal, yang hendak dijelaskan.

Pengertian asas dalam bidang hukum yang lebih memuaskan dikemukakan oleh para ahli hukum antara lain “A principle is the broad reason which lies at the base of a rule of law”. Ada dua hal yang terkandung dalam makna asas tersebut yakni pertama, asas merupakan pemikiran, pertimbangan, sebab yang luas atau umum, abstrak. Kedua, asas merupakan hal yang mendasari adanya norma hukum.

Asas hukum bukanlah suatu perintah hukum yang konkrit yang dapat dipergunakan terhadap peristiwa konkrit dan tidak pula memiliki sanksi yang tegas. Hal-hal tersebut hanya ada dalam norma hukum yang konkrit seperti peraturan yang sudah dituangkan dalam wujud pasal-pasal perundang-undangan. Dalam peraturan-peraturan (pasal-pasal) dapat ditemukan aturan yang mendasar berupa asas hukum yang merupakan cita-

cita dari pembentukannya. Asas hukum diperoleh dari proses analisis (konstruksi yuridis) yaitu dengan menyaring (abstraksi) sifat-sifat khusus yang melekat pada aturan-aturan yang konkrit, untuk memperoleh sifat-sifatnya yang abstrak.

Dalam UU Jaminan Fidusia, pembentuk undang-undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamen dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu, sesuai dengan teori dari asas hukum tersebut diatas, maka asas hukum jaminan fidusia dapat ditemukan dengan mencarinya dalam pasal-pasal dari UU jaminan Fidusia. Asas-asas Hukum Jaminan Fidusia adalah :

Pertama, asas bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia dijelaskan pengertian tentang hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Kedua, atas bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berbeda. Dalam ilmu hukum, asas ini disebut “droit de suite atau zaaksgevolg”. Pengertian dorit de suite dijelaskan sebagai the right of a creditore to pursue debiturs property into the hands of third persons for the enforcement of his claim.

Pengakuan atas asas ini dalam UU Jaminan Fidusia menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan hak kebendaan dan bukan hak perorangan. Dengan demikian, hak jaminan fidusia dapat dipertahankan terhadap siapapun juga dan berhak untuk menuntut siapa saja yang mengganggu hak tersebut. Pengakuan asas bahwa hak jaminan fidusia mengikuti bendanya dalam tangan siapapun benda itu berada memberikan kepastian hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia untuk memperoleh pelunasan hutang dari hasil penjualan objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi jaminan fidusia wanprestasi. Kepastian hukum atas hak tersebut bukan saja benda jaminan fidusia masih berada pada debitur pemeberi

jaminan fidusia bahkan ketika benda jaminan fidusia itu telah berada pihak ketiga.

Hak kebendaan jaminan fidusia baru lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku dalam fidusia. Karena itu, konsekuensi yuridis adalah pemberlakuan asas “droit de suite” baru diakui sejak tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Maksud penegasan ini tidak lain adalah kalau jaminan fidusia tidak dicatatkan dalam buku daftar fidusia berarti hak jaminan fidusia bukan merupakan hak kebendaan melainkan memiliki karakter hak perorangan. Akibatnya, bagi pihak ketiga adalah tidak dihormatinya hak jaminan fidusia dari kreditur pemegang jaminan fidusia.

Ketiga, asas bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan jaminan fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang-piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.

Dalam UU Jaminan Fidusia, asas tersebut secara tegas dinyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Sesuai dengan sifat asesor ini, berarti hapusnya jaminan fidusia juga ditentukan oleh hapusnya hutang atau karena pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh kreditur penerima jaminan fidusia. Dengan demikian, perjanjian jaminan fidusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian hutang-piutang.

Asas asesoritas membawa konsekuensi hukum terhadap pengalihan hak atas piutang dari kreditur pemegang jaminan fidusia lama kepada kreditur pemegang jaminan fidusia baru. Hal ini berarti terjadi pemindahan hak dan kewajiban dari kreditur pemegang jaminan fidusia lama kepada kreditur pemegang jaminan fidusia baru. Pihak yang menerima peralihan hak jaminan fidusia mendaftarkan perbuatan hukum tersebut ke kantor pendaftaran fidusia.

Keempat, asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. Dalam UU Jaminan Fidusia ditentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada. Jaminan atas hutang yang akan ada mengandung arti bahwa pada saat dibuatnya akta jaminan fidusia, hutang tersebut belum ada tetapi sudah diperjanjikan sebelumnya dalam jumlah tertentu. Asas ini adalah untuk menampung aspirasi hukum dari dunia bisnis perbankan, misalnya hutang yang timbul dari penyebaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.

Kelima, asas bahwa jaminan dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Pengaturan asas ini harus dilihat kaitannya dengan sumber hukum jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Salah satu prinsip yang terkandung didalam pasal ini adalah bahwa benda yang akan ada milik debitur dapat dijadikan jaminan hutang. Berdasarkan pasal tersebut dapat dirumuskan bahwa benda yang akan ada adalah benda yang pada saat dibuat perjanjian jaminan belum ada tetapi di kemudian hari benda tersebut ada. Benda yang akan di kemudian hari itu harus milik debitur.

Asas tersebut telah tertampung atau telah diakui setelah keluarnya UU Jaminan Fidusia dapat dibebankan atas benda yang akan ada. UU Jaminan Fidusia bukan saja menetapkan objek jaminan fidusia terhadap benda yang akan ada, bahkan memberikan aturan terhadap piutang yang akan ada juga dapat dibebani dengan jaminan fidusia. Apabila dipahami dengan cermat Pasal 1 angka 4 Undang-undang Jaminan Fidusia, sudah cukup jelas bahwa piutang itu tidak lain adalah benda yang tidak berwujud. Oleh karena itu, pengaturan piutang yang akan ada adalah norma yang mubajir atau berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak menganut prinsip konsistensi internal dalam menyusun pasal-pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Keenam, asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah yang terdapat diatas tanah milik orang lain. Dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan asas pemisah horisontal. Dalam pemberian kredit bank, penegasan asas ini dapat menampung pihak pencari kredit khususnya pelaku usaha yang tidak memiliki tanah tetapi mempunyai hak atas bangunan atau rumah. Biasanya hubungan hukum antara pemilik tanah dan pemilik bangunan adalah perjanjian sewa.

Ketujuh, asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Subjek jaminan fidusia yang dimaksudkan adalah identitas para pihak yakni pemberi dan penerima jaminan fidusia, sedangkan objek jaminan yang dimaksudkan adalah data perjanjian pokok yang dijaminan fidusia, uraian mengenai benda jaminan fidusia, nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek jaminan. Dalam ilmu hukum disebut asas spesialisasi atau pertelaan.

Kedelapan, asas bahwa pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia. Kewenangan hukum tersebut harus sudah ada pada saat jaminan fidusia didaftarkan ke kantor fidusia. Asas ini sekaligus menegaskan bahwa pemberi jaminan fidusia bukanlah orang yang wenang berbuat. Dalam UU Jaminan Fidusia, asas ini belum dicantumkan secara tegas. Hal ini berbeda dengan jaminan hak tanggungan yang secara tegas dicantumkan dalam Pasal 8 UU Hak Tanggungan.

Kesembilan, asas bahwa jaminan fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia. Dalam ilmu hukum disebut asas publikasi. Dengan dilakukannya pendaftaran akta jaminan fidusia, berarti perjanjian fidusia adalah perjanjian kebendaan. Asas publikasi juga melahirkan adanya kepastian hukum dari jaminan fidusia.

Kesepuluh, asas bahwa benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan. Dalam ilmu hukum diatas asas pendakuan.

Kesebelas, asas bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian.

Keduabelas, asas bahwa pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai iktikad baik. Asas iktikad yang baik memiliki arti subjektif sebagai kejujuran bukan arti objektif sebagai kepatutan seperti dalam hukum perjanjian. Dengan asas ini diharapkan bahwa pemberi jaminan fidusia wajib memelihara benda jaminan, tidak mengalihkan, menyewakan dan menggadaikannya kepada pihak lain.

Ketigabelas, asas bahwa jaminan fidusia mudah dieksekusi. Kemudahan pelaksanaan eksekusi dilakukan dengan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pada sertifikat jaminan fidusia. Dengan titel eksekutorial ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dengan hal penjualan benda jaminan fidusia, selain melalui titel eksekutorial, dapat juga dilakukan dengan cara melelang secara umum dan dibawah tangan.

d. Prosedur Pengikatan Jaminan Fidusia

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotik, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian *accessoir* (perjanjian ikutan). Maksudnya adalah perjanjian *accessoir* tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti atau

membuntuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.

Ada beberapa tahapan formal yang melekat dalam Jaminan Fidusia, diantaranya yaitu :

1. Tahapan pembebanan dengan pengikatan dalam suatu akta notaris;
2. Tahapan pendaftaran atas benda yang telah dibebani tersebut oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran.
3. Tahapan administrasi pada Kantor Pendaftaran, yaitu pencatatan Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
4. Lahirnya Jaminan Fidusia yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia disebut dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut.

Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;

Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan.

- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan, haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut.
- d. Nilai penjaminan.
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia harus dibuat oleh dan atau dihadapan Pejabat yang berwenang. Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya diantara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris.

Hutang yang pelunasannya dapat dijamin dengan jaminan fidusia adalah :

- a. Hutang yang telah ada;
- b. Hutang yang akan ada dikemudian hari, tetapi telah diperjanjikan dan jumlahnya sudah tertentu. Misalnya, hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank;

- c. Hutang yang dapat ditentukan jumlahnya pada saat eksekusi berdasarkan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban untuk dipenuhi. Misalnya, hutang bunga atas perjanjian pokok yang jumlahnya akan ditentukan kemudian.

Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa:

“ Jaminan Fidusia dapat diberikan kepada lebih dari suatu penerima Fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari Penerima Fidusia.”

Yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang mendapat kuasa khusus dan penerima Fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dan pemberi fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan wakil adalah orang yang secara hukum dianggap mewakili Penerima Fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya Wali Amanat dalam mewakili kepentingan pemegang obligasi.

Pasal 9 angka 1 UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa:

“ Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap suatu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.”

Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia. Pembebanan jaminan fidusia tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia, Pasal 10 UU Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan antara lain;

- a. Jaminan Fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
- b. Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wilayah dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Selanjutnya kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor pendaftaran fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia. Hal ini berlainan dengan FEO dan cessie jaminan yang lahir pada waktu perjanjian dibuat antara debitur dan kreditur. Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia.

Dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan:

“ Apabila atas benda yang sama menjadi objek Jaminan Fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian Jaminan Fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia.”

Dengan kata lain bahwa kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya pada Kantor Pendaftaran Fidusia adalah penerima fidusia. Hal ini sangat penting diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Sebagai bukti bagi kreditur bahwa kreditur merupakan pemegang jaminan fidusia adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan oleh kantor pendaftaran fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia. Penyerahan sertifikat ini kepada penerima fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia ini sebenarnya merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pendaftaran.

d. Akta Jaminan Fidusia

Pembebanan fidusia dilakukan dengan menggunakan instrument yang disebut dengan “akta jaminan fidusia”. Akta jaminan fidusia ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Haruslah berupa akta notaris.
2. Haruslah dibuat dalam bahasa Indonesia.
3. Haruslah berisikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

- a. Identitas pihak pemberi fidusia, berupa:
 - Nama lengkap,
 - Agama,
 - Tempat tinggal/tempat kedudukan,
 - Tempat lahir,
 - Tanggal lahir,
 - Jenis kelamin,
 - Status perkawinan,
 - Pekerjaan.
- b. Identitas pihak penerima fidusia, yakni tentang data seperti tersebut diatas.
- c. Haruslah dicantumkan hari, tanggal dan jam pembuatan akta fidusia.
- d. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.
- e. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yakni tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan, haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut.
- f. Berapa nilai penjaminannya.
- g. Berapa nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

e. Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi dalam bahasa Inggris disebut *executie* atau *uitvoering* dalam bahasa Belanda, sedangkan dalam kamus hukum berarti pelaksanaan putusan pengadilan.

Lebih lanjut Subekti memberikan definisi tentang eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan. Sedangkan Sudikno memberikan definisi eksekusi atau pelaksanaan putusan hakim pada hakekatnya tidak lain adalah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.

Jika diperhatikan pengertian-pengertian di atas, tampak sekali bahwa eksekusi-eksekusi dimaksud terbatas pada eksekusi putusan hakim (pengadilan) semata. Selain putusan hakim yang juga dapat dieksekusi adalah salinan atau akta notariil (yang berisi kewajiban membayar sejumlah uang) didalam akta tersebut memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Eksekusi dimaksud dapat diartikan sebagai upaya paksa untuk merealisasikan hak

2. Dasar Hukum Eksekusi

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, juga merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Eksekusi merupakan tindakan yang berkelanjutan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBG. Dan termasuk juga didalamnya pedoman aturan eksekusi yang harus merujuk pada pengaturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam HIR.

Tata cara menjalankan putusan yang disebut juga dengan eksekusi, diatur lebih lanjut dalam Pasal 195 sampai dengan 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 dan Pasal 258 HIR. Selain pasal-pasal tersebut, masih terdapat lagi yang mengatur pelaksanaan eksekusi yaitu Pasal 225 HIR atau 259 HIR. Kedua pasal ini mengatur eksekusi tentang putusan pengadilan yang menghukum Tergugat untuk melakukan suatu "perbuatan tertentu". Dan Pasal 180 HIR atau Pasal 1919 HIR, yang mengatur pelaksanaan putusan secara "serta merta" (uitoverbaar bij voorraad) meskipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

3. Macam-Macam Eksekusi

a. Berdasarkan Obyeknya (apa yang dapat dieksekusi), dibedakan menjadi :

1. Eksekusi putusan hakim.
2. Eksekusi grosse surat utang notaril.
3. Eksekusi benda jaminan (Objek Gadai, Hak Tanggungan, Fidusia, Cessie, Sewa Beli, Leasing).
4. Eksekusi piutang negara, baik yang timbul dari kewajiban (utang pajak, utang bea masuk) maupun perjanjian kredit (bank pemerintah yang macet, piutang BUMN maupun BUMD).
5. Eksekusi putusan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa.
6. Eksekusi terhadap sesuatu yang mengganggu hak atau kepentingan.
7. Eksekusi terhadap bangunan yang melanggar Izin Mendirikan Bangunan.

Jenis eksekusi yang objek selain putusan hakim jumlahnya jauh lebih banyak. Bahkan dilihat dari segi jumlah pelaksanaan eksekusi yang paling banyak adalah eksekusi benda jaminan oleh perusahaan umum pegadaian, diikuti dengan eksekusi terhadap benda jaminan yang lain dan eksekusi karena tunggakan piutang negara.

b. Berdasarkan prosedur, eksekusi dibedakan menjadi :

1. Eksekusi tidak langsung, terdiri dari :
 - Sanksi atau hukum membayar uang paksa, berdasar perjanjian atau putusan hukum.

- Sandera (gijzeling), Pasal 209-223 HIR.
- Penghentian atau pencabutan langganan, ini didasarkan pada perjanjian yang dapat ditemukan dalam perjanjian langganan telepon, listrik, air minum dan lain sebagainya.

2. Eksekusi langsung, terdiri dari :

- Eksekusi biasa (membayar sejumlah uang).
- Eksekusi riil terhadap :
 - a. Putusan pengadilan;
 - b. Objek lelang.
- Eksekusi melakukan perbuatan.
- Eksekusi dengan pertolongan hakim.
- Eksekusi parat.
- Eksekusi penjualan di bawah tangan atas benda.
- Eksekusi piutang sebagai jaminan (berdasar perjanjian).
- Eksekusi dengan izin hakim.
- Eksekusi oleh diri sendiri.

Adanya perbedaan eksekusi langsung dan tidak langsung didasarkan pada hasil yang didapatkan setelah dilakukan paksaan terhadap debitur yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini paksaan terhadap debitur menjadikan hak kreditur langsung terealisasi, maka eksekusi tersebut dinamakan eksekusi langsung. Sebaliknya jika dengan paksaan terhadap debitur hasilnya berupa dorongan kepada

debitur untuk segera memenuhi kewajibannya, maka eksekusi tersebut dikategorikan ke dalam eksekusi tidak langsung.

4. Eksekusi Jaminan Fidusia

Dengan berlakunya UU Jaminan Fidusia secara efektif Kantor Pendaftaran Fidusia yang telah terbentuk pada tanggal 30 September 2000 mulai menerima pendaftaran barang-barang dan Akta Pembebanan Fidusia pada tanggal 30 September 2000, maka jaminan yang bersifat kebendaan dan eksekusinya yang diatur dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.

Sebelum berlakunya UU Jaminan Fidusia, di Indonesia telah dikenal lembaga Fidusia yang bersumber dari Yurisprudensi yaitu Arrest H.G.H. (Hogerechts Hof) tanggal 18 Agustus 1932 dalam perkara BPM – CLYGNETT dan di negara Belanda Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1929 yang terkenal dengan nama Bierbrouwry Arrest. Bahwa Jaminan Fidusia yang bersumber pada yurisprudensi dan lahir untuk menyimpangi syarat mutlak jaminan gadai bahwa barang yang digadaikan harus dikuasai oleh penerima gadai atau kreditur atau pihak ketiga dengan persetujuan penerima gadai merupakan hak pribadi atau *persoonlijk recht* yang bersumber pada perjanjian, dan eksekusi tentu berbeda dengan eksekusi Jaminan Fidusia yang bersifat kebendaan.

- a. Eksekusi objek jaminan fidusia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Lembaga Jaminan Fidusia yang bersumber pada Yurisprudensi merupakan hak perorangan maka dalam hal debitur pemberi Fidusia cidera janji, tidak memenuhi kewajibannya (membayar utang) yang dijamin dengan fidusia, maka upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mendapatkan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan gugatan perdata terhadap debitur pemberi fidusia dengan memohon sita jaminan terhadap barang yang difidusiakan dan mohon putusan serta merta dalam perkara tersebut dengan mendasarkan pada bukti otentik atau dibawah tangan (yang tidak disangkal debitur/Tergugat sesuai Pasal 180 HIR).

Dalam hal barang yang difidusiakan sudah tidak ada karena telah dijual oleh pihak ketiga atau karena alasan lain atau kredit penggugat memperkirakan bahwa hasil penjualan barang yang difidusiakan tidak cukup untuk melunasi piutangnya maka kreditur/penggugat dapat minta agar barang-barang milik debitur/tergugat yang lain/ yang tidak difidusiakan disita jaminan. Sedangkan terhadap debitur/tergugat yang telah menjual objek jaminan dapat dikenakan tindak pidana penggelapan.

b. Eksekusi objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999

Eksekusi jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam BAB V UU Jaminan Fidusia sebagaimana bunyi Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan,

1. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 2 oleh Penerima Fidusia.
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.
 - c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

a. Pengertian Perjanjian

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata).

Pengertian perjanjian ini mengandung unsur :

Buku III KUHPerdata memiliki sifat yang terbuka. Maksudnya, bagi para pihak yang ingin membuat suatu perikatan atau perjanjian, bebas menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam buku III KUHPerdata, asalkan isinya tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam buku III KUHPerdata tersebut tidak tercantum definisi perjanjian secara jelas. Namun demikian, definisi perjanjian dapat ditemukan dalam doktrin (Ilmu Pengetahuan Hukum), diantaranya pendapat Subekti mengatakan :¹² “perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menertibkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

¹² Subekti, *“Hukum Perjanjian”*, Jakarta, PT Intermasa, 2005, Hal 2

Hutang-piutang dianggap sah secara hukum apabila dibuat suatu perjanjian yang berdasarkan hukum yang diatur pada Pasal 1320 KUHPerdara, antara lain:¹³

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau tekanan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUHPerdara); adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerdara). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

2. Cakap untuk membuat perjanjian;

Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa dan tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam undang-undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.

¹³ Subekti, " *Pokok-Pokok Hukum Perdata* ", Jakarta, Penerbit PT Intermasa, 1985, hal 122 dan 134

3. Mengenai suatu hal tertentu;

Perjanjian yang dilakukan menyangkut objek atau hal yang jelas dan yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum.

4. Suatu sebab yang halal;

Adalah bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subyek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek. Terdapatnya cacat kehendak (keliru, paksaan, penipuan) atau tidak cakap untuk membuat perikatan, mengenai subyek mengakibatkan perjanjian dapat dilibatkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai objek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Pasal 1313 KUHPerdara) sesuatu hal itu adalah “prestasi” (saling menguntungkan dan tidak merugikan). Prestasi dapat berupa :

- a. Sepakat bagaimana menyerahkan atau berbagai sesuatu
- b. Melakukan sesuatu

c. Tidak melakukan sesuatu

b. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut antara lain :

a. Asas Konsensual

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Asas ini dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi : (“salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak”). Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

c. Asas Pelengkap

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya menghendaki hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

d. Asas Pacta Sun Servanda

Asas ini memiliki ketentuan yang mengikat. Hal ini dapat disimpulkan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata, yang berbunyi : “ Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang di pakai adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta atau gejala yang menjadi bahan atau objek dari penelitian tersebut. Kemudian dilakukan penjelasan-penjelasan yang kritis tentang fakta-fakta tersebut, yakni dalam bentuk kerangka sistematis yang berdasarkan aspek yuridis.

Ditinjau dari jenis penelitian hukum, maka penelitian ini dapat digolongkan kedalam penelitian hukum normatif yaitu sistem penelitian yang berusaha untuk mengungkap fakta-fakta normatif melalui penggunaan bahan hukum yang relevan. Sedangkan bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

B. Sumber Data

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian pada pokok intinya dilakukan dengan melalui studi kepustakaan. Sumber data penelitian ini di dapat dari :

- a. Data Sekunder : yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum yang diperoleh Dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Peraturan Perundang-Undangan yang di pakai dalam skripsi ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Perdata
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang terdiri atas hasil-hasil penelitian terdahulu, buku karangan sarjana, dan makalah-makalah dari seminar terutama yang berkaitan dengan jaminan fidusia.

Bahan Hukum Tersier adalah Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Adapun petunjuk yang dipakai dalam skripsi ini terdiri dari :

1. Kamus Bahasa Indonesia.
2. Kamus Hukum.

C. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder adalah : Bahan-bahan hukum (legal material) yang diperoleh dari Perundang-Undangan, putusan Hakim ataupun Ensiklopedi selanjutnya dengan melakukan kategorisasi sebagai langkah pengklasifikasian bahan hukum secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang ditentukan secara universal, cermat, tepat dan ketat sesuai dengan pokok masalah. Langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut yang hasilnya lalu ditulis dengan menggunakan sistem kartu (card system).

D. Analisis Data

Bahan-bahan hukum yang telah ditulis dengan menggunakan sistem kartu dilakukan pengolahan dengan menyusun dan mengklasifikasikan secara sistematis dan kuantitatif sesuai dengan pokok bahasannya dan selanjutnya bahan hukum tersebut dianalisis.

Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan menggunakan metode pengkajian deduksi deskriptif. Metode berpikir deduksi adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Pengkajian deskriptif analisis adalah untuk menelaah konsep-konsep yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini sangat berkaitan dengan tugas ilmu hukum normatif (dogmatik) yaitu untuk menelaah, mensistemasi, menginterpretasikan dan mengevaluasi hukum positif yang berlaku bagi pengkajian tentang pokok masalah.

1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini nantinya disusun dalam empat bab. Tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung. Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab I, Pendahuluan. Merupakan pendahuluan yang menguraikan apa yang terjadi latar belakang permasalahan, merumuskan masalah yang menjadi pokok pembahasan, memaparkan tujuan dan manfaat. Di dalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian Kajian Pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi, kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, Membahas mengenai Akibat Hukum Akta Fidusia yang tidak Didaftarkan dalam Hal Eksekusi Objek Jaminan. Dalam bab Dua ini terdiri dari Dua Sub bab, Pertama tentang Akibat Hukum Akta Fidusia yang tidak Didaftarkan. Sub bab yang Kedua tentang Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tidak Didaftarkan.

Bab III, Membahas mengenai Kekuatan Hukum Akta Fidusia yang telah Didaftarkan Terhadap Eksekusi Objek Jaminan. Secara umum dalam bab ini terdapat Empat Sub bab, yakni Pertama mengenai Pelaksanaan Pendaftaran Fidusia. Sub bab yang Kedua mengenai

Akibat hukum Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia. Sub bab yang ketiga mengenai Proses Eksekusi Objek Jaminan Fidusia yang Aktanya Telah Didaftarkan. Dan Sub bab yang keempat Analisa Kekuatan Hukum Akta Fidusia Yang Telah Didaftarkan Terhadap Eksekusi Objek Jaminan.

Bab IV, Berdasarkan uraian-uraian dalam bab II dan bab III diatas tentang jawaban dari rumusan masalah yang dijadikan objek penulisan, selanjutnya ditarik Kesimpulan dan Saran dalam bab IV sebagai penutup.

1.8 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 5 (Empat) bulan, dimulai dari bulan Agustus sampai dengan November 2011. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus minggu pertama, Tahap persiapan penelitian, meliputi : penentuan judul penelitian, penulisan skripsi, seminar skripsi, dan perbaikan skripsi. Tahap pelaksanaan penelitian selama 2 bulan terhitung mulai minggu pertama bulan November sampai Desember minggu terakhir, meliputi : pengumpulan sumber data sekunder, pengolahan dan penganalisaan data tahap penyelesaian penelitian.